

**ANALISIS WACANA MENGENAI TOLERANSI BERAGAMA
DALAM SKH UMUM KOMPAS EDISI TAHUN 2010**



SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun oleh :

Kurnia Irianti

NIM. 08210043

Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. Evi Septiani, TH. Msi

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax (0274), 552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN/2/Kajur/PP.00.9/142/2012

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**ANALISIS WACANA MENGENAI TOLERANSI BERAGAMA DALAM
SKH KOMPAS EDISI TAHUN 2010**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kurnia Irianti

Nomor Induk Mahasiswa : 08210043

Telah dimunaqosahkan pada : Kamis, 30 Agustus 2012

Nilai Munaqosah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 10 Oktober 2012

TIM MUNAQOSAH

Pembimbing

Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si.

NIP. 19640923 1992203 2 001

Penguji I

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.
196612091994031001

Penguji II

Khodza, S.Ag., M.Hum
197001251999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. H. Warsono Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 197010101999031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	: Kurnia Irianti
NIM	: 08210043
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi	: Analisis Wacana Mengenai Toleransi Beragama dalam SKH Utara Kompas Edisi Khusus Tahun 2010

Sudah dapat diajukan kembali pada Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Agustus 2012

Mengetahui
dan Dekan,
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dra. Hj. Evi Septiani TH. M.Si.
NIP. 19640923 1992203 2 001

Pembimbing

Dra. Hj. Evi Septiani TH. M.Si.
NIP. 19640923 1992203 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Irianti
NTM : 08210043
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Wacana Mengenai Toleransi Beragama Dalam SKII Umum Kompas Edisi Khusus Tahun 2010" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, Juli 2012
Yang Menyatakan


Kurnia Irianti
08210043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ✚ *Almh. Ibuku yang telah menjadi inspirasi hidupku, wanita terkuat untuk putrimu sehingga mampu meraih harapan dan mimpi-mimpinya.*
- ✚ *Untuk Bapak menjadi sarjana adalah harapan dan hadiah istimewa untukmu.*
- ✚ *Kakak-kakakku tersayang Mas Manto, Mas Juni, Mas Lukman terutama Mas Is, Mbak Nur atas doa dan dukungannya.*

MOTTO

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya umat manusia akan dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji umat manusia terhadap pemberian-Nya, maka umat manusia diperintahkan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan”

(QS. Al-Maidah : 5)

KATA PENGANTAR



Syukur yang tak terbatas dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan semua makhluknya dengan penuh kesempurnaan, sehingga dengan rahmat, taufik dan hidayahNya, penulis dapat menikmati manisnya iman. Shalawat serta salam yang kemuliaanNya akan senantiasa menghiasi sejarah peradaban.

Berkat segala usaha, doa, kerja keras dan air mata akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, dan dalam kesempatan ini jugalah setulus hati penulis haturkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta para jajaran Pejabat Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dra. Hj. Evi Septiani, TH. M.Si, selaku Ketua Jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga selaku pembimbing skripsi, penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala waktu, tenaga serta kesabaran dan ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini disela-sela kesibukan Ibu yang sangat padat.
4. Ibu Ristiana Kadarsih, S.Sos, selaku Dosen Pembimbing Akademik. “Terimakasih banyak telah memberikan dan meluangkan waktu untuk memberikan saran dan

kritik serta support kepada penulis dan seluruh jajaran Dosen Fakultas Dakwah atas pengetahuan yang telah diberikan selama duduk di bangku kuliah.

5. Para Pegawai Fakultas Dakwah khususnya Ibu Ratna, Ibu Nur, Pak Miskidi, Pak Komet, Pak Amir serta seluruh Cleaning service di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
6. Khusus untuk Almh.Ibuku tersayang berjuta rasa terimakasih atas pelajaran hidup yang beliau berikan dan Bapak “Terimakasih atas sayang, cinta, do’a, semangat dan dukungan untuk putrimu ini”. Saudara-saudara tercinta Kakakku Mas Manto, Mas Juni, Mas Lukman terutama untuk Mas Is dan Mba Nur terimakasih atas bantuan doa dan materiilnya. Yang terakhir buat teman hidupku Bayu Aristianto yang selalu ada memberikan waktu dan nasehatnya
7. Sahabat-sahabat tersayang Ika, Maulani, Pipit, Farid, Zias, Syifa, Donna, Jauhar, Dimas, Rosyid, Beni, Churya, Juang dan teman-teman di KPI angkatan 2008, teman-teman KKN Relawan LPM UIN Sunan Kalijaga, teman-teman “ONTHEL KUSUKA UIN Sunan Kalijaga, teman-teman Golden Dragon Band “Terimakasih telah memberikan kesempatan kerja dan pengalaman tak terlupakan selama menjadi Stage Manager Band Golden Dragon”.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2012
Penulis

Kurnia Irianti

ABSTRAKSI
ANALISIS WACANA MENGENAI TOLERANSI BERAGAMA DALAM
SURAT KABAR HARIAN UMUM KOMPAS EDISI TAHUN 2010

Keragaman perbedaan yang ada di Indonesia merupakan suatu ciri khas dari bangsa ini. Mulai dari perbedaan suku budaya, etnis, ras bahkan agama menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang multikultural. Kini perbedaan dan keberagaman khususnya dalam hal keyakinan beragama telah menjadi perbincangan panjang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep toleransi beragama pun kini semakin luas dipahami oleh masyarakat umum, akan tetapi tidak sedikit yang antipati terhadap keberadaan untuk bertoleransi menghargai perbedaan khususnya dalam hal agama. Oleh karena itu toleransi beragama harus dipahami dengan lebih jelas dan menyeluruh apabila didalamnya ada peran media sebagai penyalur informasi nilai-nilai toleransi beragama kepada publik. Kasus yang cukup sering diberitakan pada tahun 2010 adalah kasus toleransi beragama. Pada kasus toleransi beragama yang diberitakan oleh SKH Kompas pada edisi khusus tahun 2010 menjadi hal yang cukup penting untuk dapat dipahami secara mendalam mengingat Surat Kabar Harian Umum Kompas adalah salah satu surat kabar nasional dengan cakupan pembaca lintas nasional. Harian Umum Kompas mengusung nilai-nilai humanis dalam pemberitaannya seperti pluralisme dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia dan toleransi beragama dalam memajukan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah perbedaan. Dalam memberitakan kasus toleransi beragama SKH Kompas cenderung ingin membangun dan membentuk wacana tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk membahas secara rinci mengenai wacana yang ingin dibangun oleh SKH Kompas pada kasus toleransi beragama. Kemudian metode utama pada penelitian ini dengan menggunakan metode kajian dokumentasi yaitu Surat Kabar Harian Umum Kompas edisi khusus 2010 sebagai data utama, buku-buku sejarah dan beberapa situs internet sebagai data pelengkap.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa Wacana yang dibangun SKH Kompas pada kasus pemberitaan toleransi beragama yaitu wacana yang membangun opini pembaca bahwa toleransi beragama merupakan suatu sikap untuk menghormati, saling menghargai dan memahami hak asasi manusia atau kelompok dalam hal memilih keyakinan masing-masing dalam beragama tanpa ada unsur paksaan memasuki agama ataupun tindak diskriminasi dalam menjalankan keyakinannya tersebut. SKH Kompas dalam mewacanakan kasus toleransi beragama dengan menggunakan kosakata tertentu dan penggunaan tata bahasa (sintaksis) yang memposisikan bahwa kelompok minoritas sebagai aktor utama sehingga *content* (isi) beritanya lebih terfokus pada kelompok minoritas mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, tindak anarkis dari kelompok yang mayoritas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Landasan Teori.....	11
1. Tinjauan Tentang Toleransi dan Intoleransi Beragama	11
2. Pola Toleransi Beragama Dalam Media Cetak	17

3. Wacana Sebagai Hasil Konstruksi Ideologi Media	19
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pengumpulan Data	23
3. Metode Analisis Data	24
I. Interpretasi	27
J. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : SKH KOMPAS DAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM	
KAJIAN TEKS DAN MEDIA	29
A. Profil Harian Umum Kompas	29
1. Visi dan Misi	30
2. Struktur Organisasi Harian Umum Kompas	30
B. Toleransi Dalam Konteks Historitas Indonesia dan Islam.....	31
C. Analisis Wacana dalam Media Cetak	44
BAB III : WACANA TOLERANSI DALAM PEMBERITAAN SKH	
KOMPAS EDISI KHUSUS TAHUN 2010.....	47
A. Penggunaan Kosakata dalam Pemberitaan Kasus Toleransi Beragama	47
B. Analisis pada Penggunaan Tata Bahasa	64
C. Pengaruh Sejarah Berbagai Pemberitaan Mengenai Toleransi di Indonesia dalam Memahami Wacana yang dibentuk SKH Kompas mengenai Toleransi Beragama	73
BAB VI : PENUTUP	81
Kesimpulan	81

Saran-saran	82
-------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Struktur Sintaksis Kalimat Pasif dalam berita	68
Tabel 2.	Tabel Struktur Sintaksis Kalimat Pasif dalam berita Toleransi Beragama	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Judul dan Pembimbing Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Bukti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7 Sertifikat KKN (Kuliah Kerja Nyata)
- Lampiran 8 Sertifikat Praktikum Media
- Lampiran 9 Sertifikat ICT (Information and Communication Technology)
- Lampiran 10 Sertifikat TOEFL & TOAFL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul **“Analisis Wacana Mengenai Toleransi Beragama Dalam Surat Kabar Harian Umum Kompas Tahun 2010”**, maka perlu adanya penegasan judul terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut, yaitu :

1. Toleransi Beragama

Toleransi adalah sifat atau sikap toleran yaitu bersifat atau bersikap menghargai atau bersikap, membiarkan, memperbolehkan pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹ Sedangkan secara istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerare* yang berarti menerima atau membiarkan sesuatu. Secara luas toleransi berarti suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan² dan toleransi juga dimaknai sebagai sifat atau sikap toleran saling menghargai perbedaan suku, budaya dan agama.

Dalam penelitian ini toleransi yang dimaksud lebih ditekankan pada toleransi dalam aspek beragama. Fokus dari toleransi beragama adalah menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan dari segi kebebasan memeluk agama atau keyakinan. Penghormatan terhadap perbedaan agama juga bentuk lain dari

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm : 955.

² Wikipedia-Arti istilah Toleransi/2007, <http://wikipedia.com/2012/04/makna> bahasa Indonesia

toleransi beragama. Penulis ingin menjelaskan secara lebih mendalam dalam memahami nilai-nilai toleransi beragama yang dibangun oleh media cetak. Konstruksi nilai-nilai toleransi beragama dalam media cetak juga penting untuk dipahami secara mendalam guna mengetahui wacana media cetak tersebut.

Secara singkat yang dimaksud toleransi beragama dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan menerima, menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan dari aspek memeluk keyakinan beragama antara umat Islam dan umat Kristen tanpa adanya deskriminasi antara kedua pemeluk keyakinan ini maupun dominasi terhadap kelompok yang dianggap minoritas.

2. Surat Kabar Harian Umum Kompas

Harian Umum Kompas adalah salah satu surat kabar ternama, terbesar, dengan cakupan pembaca lintas nasional. Harian Umum Kompas juga menjadi salah satu sumber informasi terpercaya. Harian umum Kompas juga dalam pemberitaan-pemberitaannya mencakup persoalan mengenai pendidikan, ekonomi, budaya, politik, hingga sosial kemasyarakatan. Dengan cakupan informasi yang luas ini menjadikan Harian Umum Kompas sebagai rujukan informasi yang aktual dan faktual.

Dengan mengusung semboyan “Amanat Hati Nurani Rakyat” Harian Umum Kompas mengusung nilai-nilai humanis dalam pemberitaannya seperti pluralisme dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia dan toleransi beragama dalam memajukan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah perbedaan. Oleh karena itulah penulis menekankan disini bahwa alasan terbesar menggunakan

harian Kompas sebagai sumber penelitian adalah karena Harian Umum Kompas dalam pemberitaannya tidak sedikit mengangkat hal-hal yang bernilai humanis.

3. Analisis Wacana

Wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan, yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lainnya sehingga membentuk satu kesatuan dan makna yang serasi diantara kalimat-kalimat tersebut dan menunjukkan keruntutan ide yang ingin diungkapkan.³ Dalam analisis wacana analisisnya melalui penggunaan kosakata yaitu dalam penggunaan kata-kata yang bermakna penghalusan sedangkan dalam tata bahasanya dalam penggunaan kalimat aktif-pasif dan kalimat nominal-verbal. Selain itu juga melalui historitas (kesejarahan) dengan melalui buku-buku sejarah.

Penekanan dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan atau praktik membangun wacana yang digunakan surat kabar umum Kompas. Konstruksi dari aspek tata bahasa dan kosakata menjadi unsur penting dalam memahami praktik membangun wacana yang dipublikasikan oleh media massa, khususnya media cetak.

Dari judul di atas dapat disimpulkan maksud yang terkandung dalam penelitian ini adalah penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai wacana yang ingin dibangun oleh surat kabar harian Kompas Edisi Tahun 2010 dalam kasus toleransi beragama dengan menggunakan analisis wacana dengan unsur-unsur melalui kosakata, tata bahasa dan historitas

³ Eriyanto, "*Pengantar Analisis Wacana Teks Media*", hlm 2.

(kesejarahan).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman dan perbedaan latar belakang penduduk yang tinggi. Dimulai dari perbedaan etnik, suku, budaya hingga agama menjadikan bangsa ini sebagai bangsa multikultural. Kini perbedaan dan keberagaman khususnya dalam hal keyakinan beragama telah menjadi perbincangan panjang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Media sebagai katalisator (penyeimbang) penyampai informasi yang berbasis aktual dan faktual juga harus memiliki peran dalam menyampaikan nilai-nilai toleransi beragama. Toleransi yang berasaskan kepada kesatuan berbangsa dan kesamaan sebagai manusia. Media massa pun memiliki andil yang cukup besar dalam memupuk nilai-nilai toleransi.

Tidak lepas dari itu, Kompas di balik pemberitaan-pemberitaannya harus tetap menjaga kode etik jurnalistik. Namun Kompas juga memiliki visi dan misi tersendiri dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Sehingga Kompas pun dalam memberitakan suatu kasus mempunyai wacana tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca.

Wacana toleransi beragama saat ini terus berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi. Perbedaan dalam segala aspek dalam masyarakat heterogen tentunya harus disikapi dengan nilai-nilai sosial dan keluhuran bertindak dalam merespon segala bentuk perbedaan di

tengah masyarakat heterogen.⁴ Disini ditegaskan akan pentingnya toleransi beragama dalam membangun masyarakat yang lebih bermoral dan beradab jelas terlihat dalam pemahaman mengenai pemberitaan-pemberitaan toleransi beragama di Kompas pada edisi tahun 2010.

Kompas sebagai surat kabar nasional dalam memberitakan berbagai kasus tidak terbatas pada lingkup lokal peristiwa, namun menyajikannya dalam cakupan yang lebih luas (nasional).⁵ Alasan kuat penulis menggunakan Kompas sebagai subjek pada penelitian karena melihat harian umum Kompas berbasis nasional dalam menyajikan sebuah peristiwa, dalam hal ini kasus toleransi beragama, surat kabar Kompas tidak dibatasi oleh lingkup lokal sehingga harian ini sifatnya lebih luas dalam melihat suatu peristiwa.

Konsep toleransi beragama pun kini semakin luas dipahami oleh masyarakat umum, akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang kurang responsif terhadap konsep toleransi beragama, umumnya masyarakat ini memahami agama sebatas tekstual dan cenderung mengabaikan konteks masyarakat yang ada.⁶ Oleh karena itu toleransi beragama harus dipahami dengan lebih jelas dan menyeluruh apabila didalamnya ada peran media sebagai penyalur informasi nilai-nilai toleransi beragama kepada publik.

Media memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengendalikan wacana tertentu diruang publik. Media sebagai alat pencetak opini publik terhadap kasus-kasus

⁴ Umar Hasyim, *"Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama"*(Surabaya:PT BINA ILMU, 1979), hlm.56

⁵Dikutip dari "Kontekstualisasi dan paradigma nilai media kompas" http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/susunan_pengurus. Diakses pukul 12.30 WIB, pada tanggal 14 Maret 2012

⁶ Umar Hasyim, *"Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama"*(Surabaya:PT BINA ILMU, 1979), hlm.126

yang sedang berlangsung diberitakan.⁷ Media sebagai sarana penting untuk mengetahui sejauh mana media massa memberitakan tentang nilai toleransi beragama dalam beritanya.

Alasan paling penting dibalik peneliti menggunakan surat kabar Kompas sebagai subjek penelitian ini didasarkan pada kapabilitas surat kabar Kompas yang dalam menjalankan aktifitas jurnalistiknya mengedepankan nilai-nilai nasional. Pemahaman mengenai nasionalisme SKH Kompas terlihat dari cakupan dan nilai-nilai pemberitaannya yang mengedepankan rujukan pilar-pilar berbangsa dan bernegara.⁸ Cakupan pemberitaan yang luas ini membuktikan bahwa Kompas menjadi rujukan informasi pembaca tanpa dibatasi oleh cakupan agama, ras, maupun lokalitas daerah.

Hal lainnya yang menjadi alasan substansial dibalik penggunaan edisi tahun 2010 bertema toleransi beragama dalam penelitian ini adalah ingin mengungkap secara lebih mendalam dari sudut keilmuan berbasis teori. Penulis pun memandang bahwa konstruksi dan reproduksi makna dibalik suatu pemberitaan terhadap kasus tertentu akan menjadi cerminan dari ideologi media tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Roger Fowler mengenai konstruksi wacana dalam media cetak. Ditambah penulis memandang konsep toleransi beragama sangat jarang dipublikasikan oleh media massa nasional secara lebih komprehensif.

⁷ Eriyanto, “*Pengantar Analisis Wacana Teks Media*”, hlm 56.

⁸ Jakoeb Oetomo “*Reaktualisasi nilai berbangsa dalam praktik dunia Jurnalistik*” materi makalah, yang disampaikan tanggal 15 Maret 2010 <http://kompas.com/2010/makalah-reaktualisasi..17-maret-2010>. .

Latar belakang inilah yang menjadi dasar kuat penulis untuk meneliti pemberitaan-pemberitaan mengenai toleransi beragama. Analisis akan pemberitaan-pemberitaan inipun mencakup tinjauan penggunaan gramatika di dalam beritanya.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana pemberitaan mengenai toleransi beragama yang dibangun oleh Kompas dalam Edisi Tahun 2010?

D. Tujuan Penelitian

Menjelaskan wacana yang ingin dibangun oleh Harian Umum Kompas Edisi Tahun 2010 pemberitaan kasus toleransi beragama.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah pengetahuan, memperkaya wawasan, dan memberikan kontribusi bagi penulis sendiri maupun media massa cetak dalam pengembangan penyusunan berita.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan manfaat sebagai kajian yang efektif dalam memahami wacana pemberitaan yang berkembang dan menumbuhkan jiwa sensitifitas dalam mengelola berita dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa KPI untuk skripsi-skripsi yang akan meneliti kasus dengan metode analisis wacana.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melalui penelusuran, observasi dan pengamatan terhadap berbagai kajian penelitian sejenis, penulis melihat bahwa penelitian mengenai hal ini harus berdasarkan pada berbagai hasil penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu perlu adanya penelusuran skripsi maupun buku pendukung terkait akan hal ini dan juga untuk memetakan hal-hal yang dianggap penting guna memudahkan pemahaman mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian. Setelah mengadakan pengamatan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Skripsi yang berjudul *“Hubungan Keberagaman Hidup dalam Konteks Toleransi antara Jamaah Ahmadiyah dengan Muslim non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I.Yogyakarta”*⁹, skripsi yang ditulis oleh Fandi Akhmad ini mendiskripsikan bahwa toleransi yang dibangun jamaah Ahmadiyah bersifat toleransi keagamaan yang mempunyai hak yang sama dalam hukum, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan di masyarakat. Terjadinya hubungan yang baik bagi masyarakat Baciro dan Jamaah Ahmadiyah menandakan kedewasaan berpikir dan pemahaman yang utuh terhadap sesama manusia yang berbeda keyakinan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Masrukah yang berjudul *“Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah)”*.¹⁰

⁹ Fandi ,Akhmad *“Hubungan Keberagaman hidup dalam konteks toleransi antara Jamaah Ahmadiyah dengan muslim non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I. Yogyakarta”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sosiologi Agama, 2008).

¹⁰ Siti, Masrukah *“Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah)”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum, 2003).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menempatkan posisi agama, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan dalam hal keyakinan beragama yaitu perbedaan di dalam UUD 1945 adalah keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sumber inspirasi sekaligus sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun secara administratif Indonesia bercorak liberal, sedangkan dalam Piagam Madinah tidak melibatkan atau memasukkan keyakinan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun di satu sisi, Al-Quran dan Al Hadits yang dijadikan rujukan terakhir dalam penyelesaian berbagai kasus internal di Madinah. Adapun persamaanya adalah agama tidak dijadikan sebagai agama negara atau yang dikenal dengan formalisme agama dalam negara. Negara tetap menjadi negara nasional bukan negara primordial. Kebebasan beragama, toleransi beragama dan sebagainya benar-benar terjamin sedemikian rupa sekalipun keduanya berbeda dalam penekanannya. UUD 1945 masih terlihat bercorak campur tangan (intervensionis) dari Piagam Madinah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari penempatan keyakinan keagamaan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara.

Skripsi yang ditulis oleh Jamal Ghofir yang berjudul *“Dakwah dan Toleransi Umat Beragama (Studi Dakwah Rasulullah di Madinah)”*,¹¹ penelitian ini mendiskripsikan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah merupakan agama yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, khususnya toleransi umat beragama di tengah-tengah masyarakat yang plural. Sebagaimana yang telah ditransformasikan oleh Rasulullah di kota Madinah dengan perjanjian Piagam

¹¹ Jamal, Ghofir *“Dakwah dan Toleransi Umat Beragama (Studi Dakwah Rasulullah di Madinah)”*, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

Madinah. Toleransi yang diharapkan Islam adalah toleransi dalam pengertian tidak berlebih-lebihan dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana toleransi yang telah dicontohkan dan dibuktikan oleh Rasulullah dalam berbagai peristiwa sejarah dan dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari di kota Madinah. Pada akhirnya Rasulullah mampu membentuk sebuah tatanan masyarakat yang sampai saat ini menjadi tolok ukur peradaban dunia, khususnya dunia Islam. Karena di kota Madinah inilah tatanan ideal masyarakat yang senantiasa dimimpikan oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia dengan berbagai keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Madinah.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hartanto yang berjudul “*Analisis Wacana Pemberitaan Mengenai Kekerasan pada Perempuan (Studi Kasus pada Halaman Patroli HU Solopos Tahun 2007)*”¹². Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan yaitu murni sebagai tindak kriminal murni. Penulis tidak menemukan adanya bias atau ketidakadilan gender pada berita kekerasan fisik ini.

Pada buku Eriyanto berjudul “*Pengantar Analisis Teks Media*” dalam buku ini dijelaskan bagaimana media dapat berperan sebagai bagian dari sistem propaganda penguasa. Media pun sebagai alat penguasa guna memarginalkan, memanipulasi, dan mendiskriminasi kelompok atau wacana tertentu. Oleh karena itu media tidak bebas dari berbagai kepentingan kelompok dominan.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai rujukan. Penelitian yang akan penulis lakukan dalam segi metode analisis memiliki

¹² Ahmad, Hartanto “*Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Perempuan (Studi Kasus pada Halaman Patroli HU Solopos Tahun 2007)* (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009)

kesamaan metode dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk menemukan wacana seperti apa yang ingin dibangun oleh media dalam hal ini SKH Kompas dalam membangun toleransi beragama.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Toleransi dan Intoleransi Beragama

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal ini disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.¹³ Toleransi disini dapat diartikan juga sebagai kebebasan beragama yaitu kemerdekaan, keadaan bebas dimana manusia yang tertindas harus berjuang untuk memperoleh kebebasan hakiki (sebagai manusia) dalam hal meyakini dan mempercayai suatu dogma tertentu. Jadi dapat dipahami bahwa kebebasan beragama adalah kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam menentukan arah keyakinan dan kepercayaan beragama. Keyakinan ini menjadi alasan kuat dan substantif untuk memilih memeluk komunitas keagamaan tertentu.

Dalam pengkajian mengenai konsep toleransi secara teoritik menurut filsuf Amerika, Emerson Ia menawarkan gagasan tentang “keyakinan subjektif (*self-reliance*)”. Menurut Emerson dan Kierkegaard keyakinan agama adalah sebuah

¹³ Soekanto, Soerjono .1982. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta : CV. Rajawali) hlm.65

paradigma dan komitmen eksistensial karena keyakinan agama pada dasarnya hanyalah konsepsi seorang yang bersifat esensial. Dengan pemahaman seperti itulah orang-orang meyakini bahwa keyakinan dari masing-masing individu merupakan hak yang paling hakiki untuk memeluk keyakinan sehingga pemahaman seperti ini dapat menciptakan sikap toleransi untuk menghormati perjuangan orang lain dalam mencari keyakinan agamanya.

Perpaduan konsep toleransi juga diutarakan oleh Josiah Royce, dia menekankan pada pentingnya loyalitas komitmen personal dan keyakinan tulus. Artinya manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya menghargai loyalitas-loyalitas orang lain selama loyalitas-loyalitas tersebut tidak bertujuan pada tindakan-tindakan destruktif (merusak).

Dalam pandangan Royce, toleransi juga berperan dalam melahirkan sikap penghargaan terhadap perbedaan yang ada, dengan tetap menjunjung loyalitas orang lain, serta mampu mengendalikan loyalitas pribadi agar tidak menimbulkan individualisme yang menegasikan loyalitas kelompok lain.

Hal sama diutarakan oleh Wazler. Wazler (1997) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara pelbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas.¹⁴ Toleransi menurut Wazler, harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap menerima adanya perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain,

¹⁴ Zuhairi Misrawi, *Opini Toleransi Versus Intoleransi* (Jakarta : Harian KOMPAS, Jumat 16 Juni 2006), hlm.6.

menghargai eksistensi orang lain dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Yang terakhir kemudian populer dengan istilah multikulturalisme.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh umat beragama dalam mengaplikasikan toleransi umat beagama. Sebagai sebuah bentuk ataupun tindakan yang menjadikan landasan terwujudnya suatu toleransi, khususnya toleransi umat beragama. Pada kajian mengenai toleransi, sepatutnya pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur pembentuk toleransi menjadi hal penting untuk dibahas, seperti :¹⁵

1. Pengakuan akan hak masing-masing manusia sebagai dasar memahami perbedaan lintas budaya, agama, politik, dan sosial kemasyarakatan.
2. Lahirnya landasan rasa penghormatan dan penghargaan terhadap keyakinan maupun kepercayaan orang lain.
3. Konsep kemasyarakatan berbasis “Agree in Disagreement” (setuju di dalam perbedaan). Hal ini menjadi indikator internalisasi budaya toleransi dalam masyarakat heterogen.
4. Kesadaran untuk saling mengerti dan memahami dalam aspek perbedaan (budaya, agama, ras, suku), sebagai pola memasyarakatkan budaya penghormatan terhadap perbedaan.
5. Penerimaan akan perbedaan yang ada, melalui konsep kejujuran dan kesantunan bersikap dalam memaksimalkan rasa penghormatan terhadap kelompok masyarakat lain.

¹⁵ Umar Hasyim, *“Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama”*(Surabaya:PT BINA ILMU, 1979) hlm. 23-25.

6. Adanya jaminan kehidupan aman, damai, rukun dan tentram sebagai landasan menjalankan nilai-nilai di dalam falsafah Pancasila

Adapun konsep toleransi akan tetap menjadi pilar utama pembentuk masyarakat yang menghargai perbedaan-perbedaan, jika dijalankan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Dialog antar agama

Secara historis setiap agama dan kepercayaan hadir secara bergantian. Namun bukan berarti hadirnya agama atau kepercayaan baru dengan sendirinya menghapus, menghilangkan dan menyingkirkan agama dan kepercayaan sebelumnya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban apabila dalam setiap masyarakat terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang beraneka ragam bentuknya.

Dalam keadaan semacam ini, dialog antar umat beragama sangatlah penting dan harus diadakan, guna terwujudnya sebuah toleransi umat beragama serta terwujudnya tatanan masyarakat yang damai dan tentram. Dengan dialog umat beragama diharapkan setiap umat beragama agar membuka diri terhadap suatu pandangan yang berbeda serta tetap pada keyakinan mereka sendiri. Dan dengan dialog ini pulalah diharapkan agar setiap umat beragama sadar bahwa tidak selamanya perbedaan ini mengarah pada suatu permusuhan.

Namun yang diperlukan disini bukanlah suatu dialog dan toleransi atau kerukunan yang hanya berada dalam tatanan permukaan. Lebih dari itu adalah menjadikan dialog sebagaimana diajarkan agama sebagai “*ideologi*”,

sebagai pandangan yang total.¹⁶ Dengan demikian adanya suasana dialogis dan penuh toleransi bukan sekedar bersifat semu dan penuh kepura-puraan, melainkan bersifat intrinsik yang tumbuh dari kesadaran mereka sendiri sehingga memiliki akar yang kukuh dalam sikap dan kehadiran mereka.

b. Kerjasama Kemasyarakatan

Kerjasama kemasyarakatan adalah suatu dasar umum bagi semua masyarakat.¹⁷ Berkaitan dengan toleransi antar umat beragama, maka kerjasama ini merupakan suatu dasar bagi terwujudnya toleransi antar umat beragama. Bila kerjasama bisa terbina dengan baik, maka bisa digambarkan bahwa toleransi akan terwujud dengan baik.

Melalui kerjasama sosial kemasyarakatan, rasa saling ketergantungan keakraban dan persaudaraan serta saling menghormati antar umat beragama dapat kiranya dipupuk dan dibina dengan baik. Sehingga bila menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama dan keyakinan yang berbeda-beda akan teratasi dan terwujudlah sebuah sikap toleransi yang saling menghormati adanya perbedaan tersebut.

Menurut Robertson¹⁸ dasar toleransi umat beragama, tidak berarti ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain dicampuradukan. Tetapi dengan dasar hidup yang mengedepankan toleransi dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki setiap individu menjadi penggabungan yang menyatukan keragaman

¹⁶ Abd A'la, *Melampui Dialog Agama*, (ed) Qomaruddin Sf (Jakarta : KOMPAS, 2002)

¹⁷ Abu Zahrh, *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein (Jakarta : Bulan Bintang, 1973) hlm.20.

¹⁸ Donald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Fedyani Saefuddin (Jakarta : Rajawali Press, 1998) hlm. ix.

interpretasi dan sistem keyakinan keagamaan.

Halim (2008) dalam artikel yang berjudul “Menggali Oase Toleransi”,¹⁹ menyatakan “Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran”. Secara umum, istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengartikan toleransi sebagai sikap “saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia”. Untuk itu, toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama. Singkatnya toleransi setara dengan bersikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Ada dua model toleransi, yaitu : Pertama, toleransi pasif yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman.

Namun perbincangan dan pemahaman mendalam mengenai konsep toleransi akan lebih luas dipahami jika toleransi dikorelasikan dengan konsep intoleransi. Intoleransi menurut Mohammed Arkoun adalah pola pandang, tutur sikap serta tindakan mendikotomi kehidupan sosial berdasarkan perbedaan, baik yang

¹⁹ Halim, Abdul .2008. “*Menggali Oase Toleransi*”, Kompas 14 April.

terbentuk melalui suasana politis, sosial, negara maupun budaya.²⁰ Intoleransi terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusifisme (ketertutupan) dalam berideologi atau beragama dan kekakuan mental yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin dogmatis.

Sedangkan Ciri-ciri pemicu berkembangnya sikap intoleransi melalui²¹ :

- a). Tumbuhnya budaya sosial maupun agama yang berakar pada dogma tekstual.
- b). Dorongan pada dialog lintas agama atau komunal (kelompok) yang semakin jarang dilakukan oleh tiap generasi masyarakat.
- c). Lahirnya ekstremisme dan radikalisme dalam lintas kehidupan antara agama sebagai akibat doktrin ketuhanan yang dipahami secara eksklusivisme.
- d). Penghargaan akan kelompok minoritas yang dalam proses perputaran zaman semakin berbeda dengan kondisi pada zaman sebelumnya.
- e). Pemaksaan terhadap kelompok tertentu dalam menjalankan norma-norma keagamaan.

2. Pola Toleransi Beragama Dalam Media Cetak

Untuk menilai media massa dalam mempublikasikan konsep toleransi beragama pada pemberitaannya, dapat diawali dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai kasus atau peristiwa yang diproduksi media tersebut, khususnya yang berkaitan erat dengan pemberitaan mengenai antaragama. Dalam

²⁰ Irwan Masduqi, *“Berislam Secara Toleran”* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011) hlm. 46.

²¹ *Ibid* : hlm. 51

teori *powerful effects theory*²² (teori efek yang kuat) dijelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung kepada pembaca. Media dalam teori ini dipandang sebagai kekuatan (*power*) untuk membentuk dan mempengaruhi pola pikir pembaca terhadap suatu kasus.²³ Untuk memahami ide atau pikiran media langkah paling mendasar adalah pemahaman secara mendalam mengenai kasus yang diproduksi oleh media tersebut. Sejauh mana pemahaman terhadap kasus tersebut akan memberikan penilaian terhadap media apakah pro (mendukung) atau sebaliknya kontra (tidak mendukung). Hal ini menjadi sangat penting karena dengan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, pembaca akan mampu memberikan penilaian media tersebut menjunjung toleransi atau sebaliknya membentuk dominasi ajaran agama tertentu dalam pemberitaannya, sehingga akan berefek pada objektivitas (kejujuran) dalam penyampaian suatu berita.

Media sebagai wadah dalam mereproduksi suatu pesan pada peristiwa tertentu, tentu juga sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Salah satu nilai yang cukup menjadi perhatian adalah nilai toleransi antaragama. Ditinjau dalam pandangan media massa nilai toleransi dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan melalui penggunaan kosakata dan tata bahasa yang tidak mendiskriminasikan maupun mendukung pihak agama tertentu dengan kebenaran subjektif masing-masing agama. Untuk itu peneliti juga mencoba mengkorelasikan dengan nilai ajaran Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemahaman yang jelas mengenai nilai toleransi antar agama yang

²² Vivian, John *Teori Komunikasi Massa*, Edisi Kedelapan, (Jakarta :Kencana, tahun 2008), hlm.469

²³ *Ibid* : hlm. 470

digunakan oleh media massa tertentu.

3. Wacana Sebagai Hasil Konstruksi Ideologi Media

Dalam pemahaman wacana sebagai hasil konstruksi ideologi media. Ideologi harus terlebih dahulu dipahami secara mendalam. Ideologi menurut Raymond William dalam Buku *Analisis Wacana* oleh Eriyanto dapat dipahami dalam tiga ranah pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat (ide palsu atau kesadaran palsu) yang bisa dilawankan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Kedua, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Dan ketiga, sebagai proses umum produksi mana dan ide.²⁴

Sedangkan hal lain yang juga penting untuk dipahami adalah wacana. Menurut J.S Badudu (2000) dalam Buku *Analisis Wacana* yang ditulis oleh Eriyanto dikatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan, yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan dan terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat tersebut dan menunjukkan keruntutan ide yang ingin diungkapkan.²⁵ Wacana tumbuh dan berkembang melalui penggunaan bahasa, baik bahasa tuturan maupun tulisan. Alex Sobur mengatakan bahwa media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan dan konflik yang beragam.²⁶ Ditambahkan pula bahwa wacana yang dikembangkan oleh media adalah bentuk dari dominasi dalam melegitimasi dominasi mereka dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 87-92.

²⁵ Lihat selengkapnya dalam Buku Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, hlm2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

memperteguh ideologi kelompok tertentu.²⁷

Berdasarkan pemaknaan ini dapat dipahami bahwa ideologi sebagai dasar sistem yang digunakan oleh kelompok tertentu akan sangat erat kaitannya dengan wacana sebagai ide yang diartikulasikan (dipraktekan) untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam media massa, wacana juga berperan penting bagi penyebaran ide atau pandangan media terhadap kasus tertentu. Wacana sebagai hasil konstruksi media diimplementasikan dalam penyusunan teks berita. Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah satu ideologi.

Eriyanto dalam bukunya *Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media"* menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Karena teks, percakapan, gambar, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau cerminan dari ideologi tertentu.²⁸ Oleh karena itu ideologi menjadi dasar utama dan penting untuk mengetahui wacana dibalik pemberitaan yang diproduksi media tersebut. Wacana yang dikembangkan oleh media massa merupakan cerminan dari ideologi yang digunakan oleh media dan melalui penggunaan bahasa (teks) berita, media massa secara tidak langsung memproduksi wacana tertentu.

Melalui penggunaan bahasa (teks), wacana yang ingin diproduksi oleh media akan lebih mudah disalurkan karena teks berita menjadi sentral dalam menyalurkan berbagai ide maupun pokok pikiran. Teks juga berperan secara langsung ataupun tidak guna mendorong opini publik ke arah yang diinginkan oleh

²⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

media. Proses produksi wacana melalui bahasa (teks) akan lebih memudahkan dalam proses publikasi di ruang publik.

Memahami penggunaan kosakata dan tata bahasa yang digunakan media tertentu juga menjadi aspek penting lainnya dalam memberikan penilaian terhadap media massa. Banyak ditemukan media massa yang sengaja menempatkan pihak atau golongan tertentu sebagai objek pemberitaannya, sedangkan pihak lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi keyakinannya ditempatkan dalam posisi minoritas. Kegiatan jurnalistik yang dalam pemberitaannya kurang seimbang antara subjek dan objek akan memperlihatkan subjektifitas sekaligus tidak menjaga netralitas dalam menyusun berita. Contohnya pada kasus pembubaran jamaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) taman Yasmin di Bekasi, pada kasus ini tidak sedikit media yang mempublikasikannya secara mendalam, namun tidak sedikit pula media yang beranggapan bahwa kasus ini sepantaskan terjadi.

Wacana yang merupakan hasil konstruksi dari ideologi media, pada dasarnya saling menguatkan diantara keduanya. Strategi paling penting yang dilakukan adalah dengan membuat kesadaran kepada publik bahwa dominasi ini diterima secara sadar karena ideologi media akan efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran atau kewajaran.²⁹

Adapun dalam media melihat bahwa bagian terpenting dalam mengkonstruksi wacana melalui pemahaman yang jelas akan peran penting dari

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

penggunaan kosakata. Dalam teori Psikologi Pesan secara jelas dan menyeluruh diterangkan bahwa bahasa (kosakata) memiliki kekuatan (*the power of words*) untuk mengatur, mengerakkan, dan mengendalikan perilaku suatu kelompok untuk bebas, merdeka dalam menentukan diantara dua pilihan, mendasari bahwa kekuatan kata (kosakata) mampu mengontrol pola pandang terhadap lingkup kasus tertentu.³⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan dapat dipercaya dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat memahami, memecahkan dan mengatasi masalah.³¹ Hal ini diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan jelas dalam memahami suatu permasalahan didalamnya. Untuk itu diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang akan diteliti secara komprehensif, karena metode berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif (landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan) sedangkan, penelitian ini

³⁰ *Ibid*, hlm. 67.

³¹ Sulistyasari, Endang, “*Audience Research, Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar, dan Pemirsa* (Yogyakarta, Andi Offset, 1993), hlm47.

berjenis penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menginterpretasikan wacana yang ingin dibangun oleh Harian Umum Kompas terhadap pemberitaan kasus toleransi beragama dalam membentuk wacana tersebut.

Subjek Penelitian ini adalah Surat Kabar Harian Umum Kompas, sedangkan Objek pada penelitian ini adalah pemberitaan kasus toleransi beragama di edisi khusus pada Surat Kabar Harian Kompas Tahun 2010 dengan jumlah 12 berita. Dalam Surat Kabar Harian Umum Kompas sebagian besar pemberitaan yang dipublikasikan merupakan wacana yang beredar ditengah-tengah masyarakat.

2.) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian dokumentasi sebagai metode utama guna mencari dan mendalami fakta dan data untuk mendukung dari penelitian ini agar memperoleh data yang valid. Kajian dokumentasi adalah teknik penelusuran berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu melalui berita-berita yang diterbitkan oleh koran Kompas. Kajian dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang mampu mendukung keaslian penelitian ini. Sumber kajian dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari data-data primer dan data-data sekunder.

- a. Data-data primer diperoleh melalui berita-berita yang dimuat oleh Harian Umum Kompas mengenai toleransi beragama pada SKH Kompas tahun 2010.

- b. Data-data sekunder diperoleh melalui buku-buku referensi yang sesuai dengan penelitian ini, buku sejarah mengenai toleransi beragama dan beberapa situs internet yang dapat membantu keabsahan dari penelitian ini.

3.) Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah praktek analisis yang menggunakan analisis pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya³² Pada penggunaan gramatika berita dan analisis terhadap konteks kesejarahan. Analisis terhadap penggunaan gramatika terdiri dari beberapa elemen penting yaitu :

a). Kosakata

Menganalisis dalam penggunaan kosakata-kosakata tertentu yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa yang sama dapat dibahasakan dengan bahasa yang berbeda.³³ Dalam menganalisis kosakata ini dilakukan dengan empat langkah :

1. Kosakata : membuat klasifikasi

Penggunaan pilihan kosakata tertentu yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu kasus atau peristiwa disini adalah membedah dan membongkar kemungkinan pemakaian bahasa tersebut untuk melegitimasi

³² Eriyanto, *Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media"* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm.7.

³³ Eriyanto, *"Pengantar Analisis Teks Media"* hlm 134.

seseorang atau membangun klasifikasi sosial kepada seseorang.³⁴ Sehingga Membentuk pihak tertentu lebih buruk dari pihak lainnya.

2. Kosakata : membatasi pandangan

Pilihan kosakata yang digunakan disini adalah untuk membatasi pandangan pembaca dalam memahami dan memaknai suatu kasus atau peristiwa.³⁵ Penggunaan kosakata-kosakata tersebut dengan ejaan yang halus agar dalam memahami atau memaknai suatu kasus atau peristiwa tidak mencari yang salah atau yang benar dalam kasus tersebut.

3. Kosakata : pertarungan wacana

Kosakata yang digunakan oleh media disini berbeda-beda versi atau pendapatnya sendiri yang bisa menimbulkan pro dan kontra atas suatu kasus atau peristiwa. Masing-masing pihak media juga mempunyai versi yang dianggap benar dalam menentukan dan mempengaruhi opini publik agar bisa diterima oleh publik.³⁶ Analisis mengenai kosakata ini dapat ditemukan dari wawancara narasumber yang dikutip oleh media cetak, baik hasil wawancara yang mendukung (pro) atau tidak mendukung (kontra).

4. Kosakata : marjinalisasi

Kosakata mengenai bagaimana peristiwa dan aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut dibahasakan.³⁷ Baik pelaku ataupun objek yang berpengaruh pada pemaknaan ketika diterima oleh khalayak.

³⁴ *Ibid*, hlm.137.

³⁵ *Ibid*, hlm.137.

³⁶ *Ibid*, hlm.140.

³⁷ *Ibid*, hlm.149.

b). Tata Bahasa

Menganalisis dari tata bahasa yang menggambarkan hubungan antara objek dengan suatu peristiwa. Seperti penggunaan kalimat transitif (kalimat langsung) dan kalimat intransitif (kalimat tidak langsung). Umumnya kalimat transitif dan intransitif digunakan pada bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Penggunaan tata bahasa dalam analisis wacana pada pemberitaan dapat dilakukan dengan dua langkah yaitu :

a. Efek bentuk kalimat pasif : penghilangan pelaku

Penggunaan tata bahasa dengan kalimat pasif yang ditekankan adalah sasaran dari suatu pelaku atau tindakan. Dalam kalimat pasif posisi pelaku bisa dihilangkan, karena dalam kalimat yang berstruktur pasif, pelaku hanya sebagai tambahan keterangan. Kalimat yang paling pokok ditunjukkan adalah sasaran (korban).³⁸ Contohnya : “dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin 4 orang mahasiswa tertembak peluru”.

b. Efek Nominalisasi : penghilangan pelaku

Penghilangan pelaku tindakan juga dilakukan melalui nominalisasi yaitu mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nominal). Dalam kalimat nominalisasi yang ditekankan adalah suatu peristiwa bukan tindakan. Pada hakekatnya peristiwa tidak membutuhkan subjek.³⁹ Contohnya : “dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin polisi menembak 4 orang mahasiswa”.

³⁸ *Ibid*, hlm 158.

³⁹ *Ibid*, hlm 162.

c.) Konteks Sejarah

Konteks sejarah (historis) disini melalui berbagai referensi buku-buku sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Agar dapat memilih-milah suatu peristiwa sesuai dengan konteks sejarahnya.

I. Interpretasi Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan analisis kasus mengenai toleransi beragama diharapkan dapat menemukan hal yang pokok dibalik pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui pemberitaan-pemberitaannya.

Proses dan mengolah analisis data yang didapatkan menjadi bahan acuan guna melakukan interpretasi data. Proses interpretasi data ini dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis wacana yang sudah dilakukan dan dengan adanya saling keterkaitan setiap data menjadi penting agar dapat melakukan interpretasi data yang bernilai teoritik.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti ingin membagi beberapa hal penting penelitian kedalam empat bab terpisah guna memudahkan dalam merancang sistematika isi pembahasan penelitian.

Bab I : Pada bab ini, menekankan pada bab pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian. Inilah yang menjadi pokok bahasan pada bab I.

Bab II : Pada bab II lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai toleransi agama dalam kajian teks dan media meliputi Profil Surat Kabar Harian Kompas, Sejarah Perkembangan Toleransi di Indonesia, Wacana Toleransi Agama di Media Massa di Indonesia dan Analisis Wacana dalam Media Cetak.

Bab III : Dalam bab ini, memfokuskan pada Wacana Toleransi dalam Pemberitaan Harian Umum Kompas Tahun 2010 yang meliputi dua bab bahasan yaitu Praktek penggunaan kosakata dalam pemberitaan kasus toleransi beragama dan Analisis pada praktik penggunaan Tata bahasa.

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang telah dilakukan terdiri dari Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

SKH Kompas cukup intensif dalam memberitakan kasus toleransi beragama. Pada Edisi Tahun 2010 pemberitaan mengenai toleransi beragama mendapatkan porsi yang cukup besar dari SKH Kompas. Berdasarkan Analisis Wacana dengan menggunakan model Roger Fowler terhadap berita tersebut tampak adanya wacana tertentu yang ingin dibangun dan dibentuk oleh SKH Kompas pada kasus toleransi beragama. Wacana yang ingin dibangun oleh SKH Kompas pada kasus ini dan proses pembentukan wacana tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wacana yang dibangun SKH Kompas pada kasus pemberitaan toleransi beragama yaitu wacana yang membangun opini pembaca bahwa toleransi beragama merupakan suatu sikap untuk menghormati, saling menghargai dan memahami hak asasi manusia atau kelompok dalam hal memilih keyakinan masing-masing dalam beragama tanpa ada unsur paksaan memasuki agama ataupun tindak diskriminasi dalam menjalankan keyakinannya tersebut.
2. SKH Kompas dalam mewacanakan kasus toleransi beragama dengan menggunakan kosakata tertentu dan penggunaan tata bahasa (sintaksis) yang memposisikan bahwa kelompok minoritas sebagai aktor utama sehingga *content* (isi) beritanya lebih terfokus pada kelompok minoritas mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, tindak anarkis dari kelompok yang mayoritas.
3. Konsep Toleransi dalam pemberitaan SKH Kompas pada ranah tatanan

penulisan (kosakata maupun tata bahasa) terlihat indikasi paradoks, pada satu sisi muatan pemberitaan terkesan mendukung nilai-nilai toleransi, akan tetapi pada kesempatan lainnya, SKH Kompas cenderung terlihat kurang memberikan porsi yang layak akan pentingnya nilai-nilai toleransi bagi pembaca.

4. SKH Kompas dalam pemberitaan kasus toleransi antar agama, dalam sudut pandang dunia jurnalistik, mampu menempatkan diri pada posisi menjaga netralitas, akuntabilitas (tanggungjawab), dan transparansi dalam mengungkapkan fakta sesuai dengan realitas yang berkembang.

Dari hasil analisis wacana pada kasus toleransi beragama pada SKH Kompas wacana yang ingin dibentuk adalah membentuk persepsi masyarakat atau pembaca dalam menyikapi, memahami, mengerti, dan menerapkan tentang makna toleransi dalam hal keyakinan beragama yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka terdapat beberapa saran yang disampaikan yaitu :

1. Hasil analisis yang penulis lakukan terhadap kasus toleransi beragama sebaiknya wacana yang dibangun oleh SKH Kompas dilakukan dengan memberikan porsi yang seimbang dan objektif dalam menilai sebuah kasus yang akan dipublikasikan kepada publik.
2. Media sebaiknya memberikan informasi-informasi yang dapat membentuk pemahaman pembaca yang netral dalam menyikapi sebuah kasus yang

sedang terjadi.

3. Bagi para pembaca diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam melihat dan menyikapi suatu berita yang diberikan oleh media, sehingga tidak menciptakan anggapan yang negatif terhadap kasus yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hartanto *“Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Perempuan (Studi Kasus pada Halaman Patroli HU Solopos Tahun 2007)”* (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
- Ali et.al, *“The end of tolerance”* (London : Nicholas Brealey Publishing, 2002).
- Amin Abdullah, *“Studi Agama, Normativitas atau Historitas”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, 2002).
- A Munir Mulkhan, *“Nalar Spiritual Pendidikan (Solusi atas problem filosofis pendidikan Islam)”*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002).
- Daniela Goeudevert *“Nothing from Nothing : Tolerance and Competition”*. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2005).
- Eriyanto, *“Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media”* (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Faisal Ismail, *“Islam Idealis, Ilahiyah dan Realitas Insaniyah”* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Fandi Akhmad, *“Hubungan Keberagaman Hidup dalam Konteks Toleransi antara Jamaah Ahmadiyah dengan Muslim non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I. Yogyakarta”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sosiologi Agama, 2008).
- Fridman Schulz Van Thun, *“Lets Talk : Ways toward mutual understanding”* (Yogyakarta, LKis, 2001).
- Irwan Masduqi, *“Berislam secara Toleran”* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011).
- Kepala Kantor Depag *“Buku Tanya Jawab”* (Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama DIY, tahun 2008).
- Maarif. *“Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikulturalisme Negara” Volume 5 no 2* (Jakarta : Maarif Institute for Culture and Humanty, 2010).
- Siti, Masrukah *“Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah)”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas

Syariah, Jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum, 2003).

Sulistiyasari, Endang, “*Audience Research, Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar, dan Pemirsa* (Yogyakarta, Andi Offset, 1993).

Umar Hasyim, “*Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*”(Surabaya:PT BINA ILMU, 1979).

Vivian, John, “*Teori Komunikasi Massa*”, Edisi Kedelapan(Jakarta : Kencana, tahun 2008).

Wahid, Abdul, “*Analisis Wacana Berita Kerusuhan Mei 1998 di Harian Kompas, Republika, dan Jawa Post Periode Bulan Mei-Juni 1998*, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM.2000).

Widodo, Dodi “*Framing Pemberitaan Wacana Pemberhentian Invasi dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Irak di Harian Umum Kompas dan Republika Edisi 20 Februari hingga 20April*”(Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008).

Wikipedia-Arti istilah Toleransi/2007, <http://wikipedia.com/2012/04/makna> bahasa Indonesia.

Yusuf Qardawi, “*Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam*”,(terj), (Bandung: Karisma, Cet.III, 1994), hal.42.

Toleransi Umat Beragama Turun

| Senin, 17 Januari 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir, toleransi antarumat beragama terasa berkurang. Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendi Yusuf mengatakan, fenomena intoleransi antarumat beragama tersebut merupakan gejala global yang tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Soal intoleransi meningkat itu gejala global, mungkin karena terbawa situasi politik," katanya se usai menggelar pertemuan dengan ormas-ormas Islam membahas kerukunan antarumat di kantor MUI, Jakarta, Senin (17/1/2010).

Dalam sepuluh tahun terakhir, kata Slamet, masyarakat seolah tidak dapat membedakan mana yang merupakan urusan agama dan mana yang bukan. Urusan politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan yang karut-marut menjadi pemicu intoleransi tersebut. Terkadang, masyarakat membawa-bawa agama dalam urusan politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan itu.

"Banyak faktor, kita tidak bisa melihat intoleransi dalam kontek hubungan antarumat beragama. Berkaitan dengan hubungan kepentingan, politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak semata-mata karena agama. Masyarakat mengalami dislokasi," paparnya.

Sementara itu, Direktur International Crisis Group Indonesia Sidney Jones berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang memicu intoleransi tersebut, antara lain, proses ekspansi ajaran agama pada kawasan yang tidak tepat, *culture* demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama setiap umat, kurangnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah, dan kurang tegasnya pihak kepolisian.

"Misalnya, dalam demokrasi, makin banyak ruang Islam garis keras berekspresi. Tapi, ada yang bisa dikatakan penyebaran kebencian untuk satu agama atau kelompok itu juga makin luas di Indonesia tanpa ada diskusi antara garis batas kebebasan berekspresi dan penghasutan kriminal," ujar Sidney.

Atas kondisi tersebut, menurut Sidney, diperlukan sebuah kebijakan ketat, tanpa toleransi terhadap aksi apa pun yang menghakimi kelompok agama lain. Slamet Effendi pun mengatakan hal yang sama. Diperlukan saling menghargai, mengerti, dan menjaga perasaan setiap umat. "Dibangun saling pengertian, selain regulasi, termasuk di dalam dakwahnya. Misalnya, penyalahgunaan simbol-simbol agama, misal simbol Kristen jangan dipakai oleh orang Islam, begitu pun sebaliknya," papar Slamet.

Dialog Intensif dan Silaturahmi Mesti Dikedepankan

| Jumat, 22 Januari 2010 |

BANTEN, KOMPAS.com — Dialog yang lebih intensif dan silaturahmi antar-umat beragama serta kebudayaan mesti lebih dikedepankan untuk terus menjaga persatuan dan perdamaian. Demikian disampaikan Chairman Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi seusai berbicara dalam Seminar Internasional bertema "Unity in Diversity" yang diselenggarakan pada Jumat (22/1/2010) di Aula Syahida Inn, Kompleks Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Provinsi Banten.

Menurut Zuhairi, saat ini perlu diperbanyak lagi ruang-ruang komunikasi publik untuk kepentingan dialog itu. Ia mencontohkan itu dengan yang dilakukan almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Melihat kondisi kekinian, Alumnus universitas Al Azhar, Kairo ini juga memaparkan keprihatinan sosial keagamaan di Indonesia yang semakin terkikis oleh hegemoni dan desakan kelompok mayoritas dengan mengatasnamakan menjaga kemurnian agama. "kondisi ini semakin diperparah dengan pengaruh agama yang paling dominan. Permasalahan yang dihadapi dalam hubungan mayoritas-minoritas cenderung mengalami pembiaran dari negara, sehingga warga cenderung kehilangan ekspresi kebebasan beragama. Hal ini dengan mudah disaksikan dari pembatasan pilihan agama di kartu penduduk" paparnya.

Dalam acara yang diadakan Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Ciputat serta organisasi internasional Arus Damai dan Simply Islam itu hadir pula tiga pembicara lain. Mereka adalah Syakh Ahmed Tijani ben Omar dari Ghana, Syakh Faraz Rabbani dari Kanada, dan Syakh Saad Al Attas dari Inggris.

Syakh Ahmed Tijani seusai menguraikan pokok-pokok pikirannya mengatakan bahwa yang kini juga harus dimulai oleh setiap Muslim ialah dengan menyemai bibit-bibit perdamaian sejak dalam diri sendiri. Kata Ahmed, perang paling besar justru adalah perang melawan hawa nafsu sendiri.

Pluralisme

Jawa Barat Krisis Toleransi Beragama

Maria Natalia | Heru Margianto | 04 Maret 2010 |



KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT Penyerbuan Ahmadiyah di Bogor Masjid yang rusak setelah dibakar massa di Ciampea Udik RW 5, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/10/2010). Massa menyerang desa yang dihuni sekitar 500 jemaah Ahmadiyah tersebut, menghancurkan belasan rumah dan membakar dua rumah serta satu masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jawa Barat adalah provinsi yang paling tidak toleran dalam hal kebebasan beragama. Sepanjang tahun 2010, Setara Institute mencatat, Jawa Barat mencatat angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yaitu 91 peristiwa.

Demikian evaluasi Setara Institute mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2010. Evaluasi ini disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi didampingi peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, di Jakarta, Senin (24/1/2011).

"Ada banyak radikalisme di daerah ini (Jawa Barat). Bermunculan juga kelompok-kelompok garis keras. Mereka bersaing menunjukkan eksistensi masing-masing kelompok," ujar Ismail.

Saat ini bangunan kehidupan toleransi masyarakat Indonesia dirusak oknum tak bertanggungjawab. Beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dicatat Setara Institute antara lain insiden Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Desa Ciketing, Bekasi, 12 September 2010. Penolakan atas pembangunan gereja berujung pada penusukan pendeta dan penatua HKBP.

Selanjutnya, perusakan rumah dan masjid di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Bogor, 2 Oktober 2010. Di Tasikmalaya, massa menggembok panti asuhan

milik Ahmadiyah pada Desember 2010. Dalam aksi tersebut, 10 anak terkunci di dalam panti asuhan, padahal mereka akan mengikuti ujian sekolah.

Tokoh Masyarakat, Ismail menyayangkan sikap pemerintah daerah Jawa Barat yang terkesan mendiamkan peristiwa-peristiwa ini. "Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terlihat memilih diam dan terkesan menjaga jarak atas berbagai aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran ini. Belum ditunjukkan sikap yang tegas atas peristiwa-peristiwa tersebut," tutur Lelaki paruh baya ini.

Sebelumnya, akhir tahun lalu, Moderate Muslim Society (MMS) juga melaporkan, Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam aksi intoleransi. Dalam catatan MMS, Dari 81 kasus intoleransi, lebih dari separuhnya, yakni 49 kasus atau 61 persen, terjadi di Jawa Barat.

Tindakan Intoleransi Naik 30 Persen

| Selasa, 21 Desember 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama puluhan bahkan ratusan tahun, bangsa Indonesia mampu hidup berdampingan secara damai. Tidak ada bukti sejarah bahwa perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan agama adalah sumber konflik. Ini disebut modal sosial yang memperkuat dan meneguhkan keragaman bangsa yang dikukuhkan dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman bagus dalam mempraktikkan toleransi. Dari data yang dihimpun Moderate Muslim Society (MMS), dalam sepuluh tahun pertama Indonesia merdeka, kasus-kasus intoleransi belum pernah terjadi.

Kasus intoleransi baru terjadi pada sepuluh tahun kedua dengan dua kasus. Fenomena intoleransi menjadi semakin sering terjadi setelah orde baru berkuasa, dan makin sering setelah orde baru tumbang. Puncaknya pada periode tahun 1995-2004, yang mencapai 180 kasus.

"Laporan MMS tahun 2010 mencatat telah terjadi 81 kasus intoleransi, meningkat 30 persen dari laporan tahun 2009 yang mencatat 59 kasus intoleransi," kata Zuhairi Misrawi ketua MMS dalam Laporan Toleransi dan Intoleransi tahun 2010 di Aula Paramadina Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2010).

Zuhairi mengatakan, dari 81 kasus intoleransi, jenis kasus yang paling sering terjadi adalah 24 kasus penyerangan dan kerusakan, 24 kasus penutupan dan penolakan rumah ibadah, 15 kasus ancaman, tuntutan dan intimidasi, 6 kasus penghalangan kegiatan ibadah, 4 kasus diskriminasi karena keyakinan, 3 kasus pembubaran kegiatan atas nama agama, 3 kasus kriminalisasi paham keagamaan, dan 2 kasus pengusiran.

Dari segi wilayah atau tempat, sepanjang tahun 2010 tindakan intoleransi paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 49 kasus, Jawa Timur dengan 6 kasus, DKI dengan 4 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 4 kasus.

Pelaku dan korban

Dari segi pelaku intoleransi, massa yang tidak diketahui dari mana menjadi pihak paling sering melakukan tindakan intoleransi, yakni dengan 33 kali. Negara juga melakukan tindakan intoleransi sebanyak 24 kali dan organisasi masyarakat (ormas) sebanyak 23 kali.

"Tiga besar pelaku intoleransi di atas tidak mengalami perubahan dari temuan MMS dalam laporan akhir tahun 2009. Pemerintah daerah atau pemerintah kota, polisi, dan satpol pp merupakan tiga aparaturnya yang paling sering melakukan tindakan intoleransi," kata Zuhairi.

Dari segi korban, MMS mencatat umat Kristiani dan pengikut Ahmadiyah menjadi korban paling sering menjadi sasaran baik dari pemerintah, ormas dan massa. Umat Kristiani mengalami perlakuan intoleransi sebanyak 33 kali, Ahmadiyah sebanyak 25 kali, dan kelompok yang dianggap sesat sebanyak 11 kali.

Zuhairi mengatakan, berdasar kategori intoleransi versi Karuna Center for Peacebuilding, hampir semua jenis dan tingkatan intoleransi kecuali *genocide* sudah terjadi. "Mulai dari penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*), pandangan yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*de-humanization*), pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*), penyerangan (*act of aggression*) hingga pengorganisasian pembunuhan massal (*mass violence*) sudah terjadi," paparnya.

"Ancaman intoleransi masih sangat mengkhawatirkan, bukan hanya karena tindakan intoleransi meningkat tajam. Namun, pihak-pihak yang sejatinya menjaga toleransi justru menjadi pelaku intoleransi," ujar Zuhairi.

TOLERANSI BERAGAMA

Negara Wajib Lindungi Korban Intoleransi

Adi Dwijayadi | Latief | Rabu, 22 Desember 2010 |



Kantor konsultan dibakar oleh kelompok tidak dikenal di daerah Situbondo (19/12/2010), Jawa Timur. Tidak ada korban dalam kasus pembakaran yang terur dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Resor Kota Situbondo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara wajib melindungi hak-hak dan kebebasan kelompok yang akan dan telah menjadi korban tindakan intoleran, kekerasan, atau kriminal. Kewajiban tersebut sebagai implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, mencakup kebebasan beribadah dan lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam konferensi pers hasil riset lembaganya bertajuk 'Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat', Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kelompok minoritas agama atau keyakinan yang menjadi korban kekerasan dan intoleran itu merupakan sasaran dari agenda beberapa organisasi Islam radikal," kata Bonar.

Sebab itu, lanjut Bonar, negara hendaknya menerapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara di mata hukum (*equality before the law*).

"Kalau asas itu sudah dijalankan, setiap orang atau kelompok nantinya dapat saling menghormati," ujarnya.

Seperti diberitakan, SETARA Institute mencatat adanya empat agenda organisasi Islam radikal, yakni, pertama, penegakan syariat Islam, kedua pemberantasan kemaksiatan, ketiga pemberantasan aliran sesat dan keempat anti pemurtadan. SETARA Institute beranggapan, bila keempat agenda itu dikumandangkan di tengah masyarakat, ruang publik bakal diisi dengan hal-hal yang bersifat kebencian yang

tertuju pada kaum minoritas agama atau keyakinan serta kelompok usaha di bidang yang menimbulkan kemaksiatan.

Pada sebuah titik, saat ada tindakan yang penuh tidak toleran, kekerasan dan kejahatan, negara harus menunaikan kewajiban melindungi hak-hak asasi manusia.

"Ada dua langkah yang bisa ditempuh negara. Pertama, kewajiban mencegah aksi intoleransi yang mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain. Kedua, bila pelanggaran terjadi, negara wajib memproses pelaku sesuai hukum," jelas Bonar.

Tak Toleran akibat Ekonomi Kurang Merata

Adi Dwijayadi | A. Wisnubrata | Rabu, 22 Desember 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com — Intoleransi masyarakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi radikal yang suka memakai kekerasan, tetapi karena masyarakat mengalami frustrasi sosial dan alienasi. "Masyarakat itu tidak puas terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi," ujar Ismail Hasani, peneliti SETARA Institute, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan SETARA Institute, keberadaan organisasi radikal dinilai tak terlalu berpengaruh banyak bagi ketidaktoleransian masyarakat. Sebab, mayoritas warga menolak kekerasan sehingga otomatis dukungan terhadap organisasi radikal tidaklah signifikan.

Menurut Ismail, di tengah kesulitan ekonomi, organisasi radikal yang mengatasnamakan agama hadir untuk membuat masyarakat menjadi intoleran. Untuk itulah, pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat. "Sebagai contoh di Tasikmalaya, pemerintah setempat memberikan kanal ekonomi, berupa penyuluhan ternak lele. Masyarakat kemudian jadi sibuk bekerja dan merasa puas secara ekonomi," kata Ismail.

Studi SETARA Institute ini berfokus pada organisasi radikal yang bersifat lokal. "Kami mengacu pada fakta bahwa organisasi tersebut sering melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan," kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menurut Bonar, sampai saat ini belum ada kajian khusus dan komprehensif tentang organisasi radikal lokal serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok radikal menunjuk pada aksi-aksi kekerasan terhadap kaum minoritas agama/keyakinan, penyerangan rumah ibadah, dan penegakan syariat.

Di tempat berbeda, nada pesimis terdengar dari pihak yang menamakan diri "masyarakat anti ahmadiyah" (RAHMAH), di Solo. Penanggungjawab harian RAHMAH, Ade Agustin menjelaskan bahwa kurang tetap apabila pemerintah hanya melihat "api" bukan pemicu dari "nyala api" tersebut, jelasnya. "kita sebagai rakyat kecil, Cuma pingin kedamaian, tapi kalau kondisi kayak seperti ini (red:keberadaan Ahmadiyah), kita kan marah juga, dan kita tidak *ujuk-ujuk* menyerang mereka (Ahmadiyah), tapi melalui proses sejak dua tahun lalu" kenangannya. "kalau kami menyerang itu karena kami wes lelah, tidak pernah digubris" lanjutnya melalui sambungan telepon dari Solo.

Masyarakat Tak Tolerir Nikah Beda Agama

| Rabu, 22 Desember 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com - Toleransi masyarakat Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dinilai terbatas pada hal-hal terkait relasi sosial saja, seperti pertemanan, hidup bertetangga dan ikut perkumpulan.

"Warga Jabodetabek justru memperlihatkan intoleransi yang cukup tinggi dalam hubungan-hubungan yang lebih privat," kata Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, ketika tampil sebagai pembicara dalam Launching Riset 'Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat' pada Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat.

SETARA Institute menyebut, hubungan privat yang dimaksud adalah ketika salah seorang anggota keluarga menikah dengan orang lain yang beda agama dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain. Hasil riset ini cenderung serupa dengan survey nasional beberapa lembaga, seperti CRCS UIN Jakarta (2010), Malindo Institute (2008) dan Lembaga Survei Indonesia (2006).

Masyarakat Jabodetabek juga merasa keberatan apabila rumah ibadah dari umat agama lain dibangun di dekat tempat tinggalnya. "Rumah ibadah dari agama lain yang dekat dengan rumahnya masih jadi persoalan sensitif bagi warga Jabodetabek," kata Bonar.

Meski cenderung tidak toleran terhadap relasi-relasi privat, masyarakat Jabodetabek umumnya tidak setuju terhadap berbagai bentuk aksi kekerasan berlabel agama yang diusung sejumlah organisasi Islam radikal, seperti pemberantasan maksiat, pembubaran Ahmadiyah dan pembatasan pendirian rumah ibadah.

"Akan tetapi, pandangan responden relatif berimbang pada saat berbicara mengenai penegakan syariah Islam dan khilafah," kata Bonar.

Toleransi Agama Dijaga

Jumat, 24 Desember 2010

Jakarta, Kompas - Kalangan aktivis organisasi kepemudaan lintas agama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap melemahnya toleransi terhadap kelompok minoritas. Mereka mendesak pemerintah bersikap tegas menindak pelaku kekerasan yang melemahkan perilaku toleransi antarumat beragama.

Sekretaris PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Doddy Nugroho membacakan pernyataan bersama 13 elemen organisasi kepemudaan di Jakarta, Kamis (23/12). Mereka, antara lain, Maarif Institute, Komite Indonesia Bangkit, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

Fajar Riza Ul Haq dari Maarif Institute mengatakan, seruan ini menjadi awal gerakan moral mendorong pemerintah agar kebebasan beragama, keadilan sosial, dan politik di tahun 2011 menjadi lebih baik. "Kami akan menghimpun kekuatan masyarakat sipil untuk itu," ujarnya.

Kesadaran ini muncul dengan maraknya kasus kekerasan berkait agama sepanjang 2010. Bahkan, Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia mencatat, sedikitnya 300 kekerasan berlatar belakang agama terjadi sejak tahun 2009 hingga kini. Tahun 2010 saja, ada sekitar 120 kasus, misalnya di Jawa Barat seperti penutupan panti asuhan milik jemaah Ahmadiyah dan penyegelan tempat ibadah HKBP di Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Peristiwa ini, kata Sekretaris Jenderal Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cokro Wibowo Sumarsono, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sistemik. "Padahal, semua umat juga memiliki saham besar dalam pendirian Republik Indonesia," ungkapnya.

Oleh karena itu, mereka berharap, Natal tahun 2010 menjadi momentum menguatkan kembali tali perdamaian dan perbaikan di masa depan. "Kemanusiaan harus didahulukan dari fanatisme agama," ujar Ketua Umum PB HMI MPO M Chozin. (SIN)

Warga Jabodetabek Tak Toleran

| Senin, 29 November 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Jakarta dan sekitarnya cenderung bersikap intoleran dalam kehidupan beragama. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak dapat menerima pendirian tempat ibadah oleh penganut agama lain. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute mengenai toleransi sosial masyarakat perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jajak pendapat opini publik tersebut memperlihatkan, sebanyak 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sebanyak 45 persen lainnya dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain dan sisanya tidak menjawab.

"Ini menunjukkan potensi ketegangan antarumat beragama akan tetap muncul," kata Manajer Program Setara Institute, Ismail Hasani, Senin (29/11/2010) siang di Jakarta.

Jika diperinci, warga Bekasi, Jakarta Pusat, Depok, dan Tangerang paling menentang pendirian rumah ibadah agama lain dengan respons penolakan lebih dari 50 persen. Di Bekasi, 74 persen responden merespons penolakan dan hanya 2 persen yang menerima. Di Jakpus, 68 persen responden menolak dan 12 persen menoleransi. Sebanyak 66 persen responden di Depok menolak pendirian tempat ibadah lain, sedangkan warga Tangerang yang menolak sebanyak 62 persen.

Para responden itu juga menunjukkan intoleransi masyarakat dalam mengartikan kebebasan beragama. Meski lebih dari 82 persen responden setuju dengan kebebasan seseorang memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing, tetapi 53,8 persen responden tidak setuju jika kebebasan agama juga diartikan dengan kebebasan mendirikan tempat ibadah.

Lebih dari separuh (53,4 persen) responden juga meminta agar pendirian rumah ibadah diatur berdasarkan kesepakatan para pemuka agama dan pemerintah. Penolakan cukup signifikan juga terlihat dalam hal penerimaan terhadap kepercayaan di luar enam agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebanyak 60,9 persen responden tidak dapat menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat.

Survei Setara Institute ini dilakukan sejak 20 Oktober-10 November 2010 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan margin kesalahan 2,2 persen. Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara langsung berdasarkan kuesioner.

Jawa Barat-Banten Paling Tak Toleran

| Selasa, 21 Desember 2010 |



Warga melihat masjid yang dibakar massa di Ciampea Udik RW. 5, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/10/2010). Massa menyerang desa yang dihuni sekitar 500 jemaah Ahmadiyah, menghancurkan belasan rumah dan membakar dua rumah dan satu masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kawasan Provinsi Jawa Barat dan Banten dinilai sebagai kawasan dengan tingkat toleransi antarumat beragama paling rendah untuk tahun 2010. The Wahid Institute mencatat bahwa dua kawasan ini masih menduduki peringkat terendah dan sama seperti pada tahun 2009.

Dari 133 kasus yang dicatat The Wahid Institute di 13 wilayah di Indonesia, 43 kasus intoleransi dan diskriminasi terjadi di Jawa Barat dan Banten. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi kedua dan Jakarta di posisi ketiga. Sikap intoleran dan diskriminasi ini paling banyak diwujudkan dalam tindakan pemaksaan dan pembatasan keyakinan. "Persoalan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya.

Sikap intoleran dan diskriminasi ini paling banyak diwujudkan dalam tindakan pemaksaan dan pembatasan keyakinan. "Persoalan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Ini menjadi indikasi bahwa kehidupan beragama kelompok minoritas kurang diperhatikan secara serius. Modusnya bisa dengan mengadili, mengintimidasi, hingga mengkriminalkan, termasuk diikuti penyerangan

fisik dan penyebaran kebencian," ungkap Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid, Selasa (21/12/2010).

Sikap intoleran dan diskriminatif juga terwujud dalam pembatasan rumah ibadah, baik gereja, wihara, maupun masjid. Terdapat pula ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap penganut agama lain. Pelaku tindakan intoleran dan diskriminatif ini didominasi oleh masyarakat sipil. Menurut Yenny, masyarakat sipil yang dimaksud adalah ormas-ormas berbasis agama atau yang beratribut agama tertentu.

Secara terpisah juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Sekaligus tim kuasa, Mulawarman menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan *sweeping* (mengeledahan) bukan merupakan unsur main hakim sendiri. Melainkan ini sikap membela dan respon terhadap kurang antisipatif pihak berwajib. "jangan salahkan kami apabila kerusakan yang terjadi di beberapa tempat. Ini adalah puncak salju dari kekecewaan masyarakat terhadap kelakuan pihak berwajib dan pemerintah yang kurang responsif, *wong* kita juga tahu norma-norma sosial" ujar lelaki yang akrab disapa Ustad Warman ini.

Perayaan Nyepi Diwarnai Semangat Toleransi

| Sabtu, 24 Maret 2012 |

Denpasar, Kompas - Perayaan Nyepi di Bali, Jumat (23/3), tidak hanya aman dan lancar, tetapi juga mencerminkan tingginya toleransi antarumat beragama di "Pulau Dewata" itu. Umat Hindu dan Islam di Bali melaksanakan Nyepi dan shalat Jumat secara harmonis.

Berdasarkan pantauan di Masjid An-Nur, Kota Denpasar, Jumat siang, ratusan umat Islam datang dengan berjalan kaki. Mereka tidak menggunakan kendaraan bermotor karena dapat mengganggu umat Hindu yang sedang melaksanakan Catur Brata Penyepian, yaitu tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang.

Volume pengeras suara masjid juga sudah diperkecil dan hanya diarahkan ke area masjid. Menurut Imam Masjid An-Nur Hoesin Muhtar, toleransi umat beragama di Bali mengalami kemajuan. "Ada kebijakan baru dari pemerintah, warga Islam yang jauh dari masjid dan tidak mungkin berjalan kaki dapat menggunakan bale banjar desa setempat untuk shalat," katanya.

Salah satu warga, Ariyanto (28), mengaku lebih khusyuk mengikuti shalat Jumat pada hari Nyepi. "Suasananya tenang, tidak seperti hari biasa ketika di luar masjid bising suara kendaraan bermotor," katanya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bali Ida Bagus Gede Wiyana mengatakan, Nyepi pertama kali diadakan pada tahun 78 Masehi. "Pada waktu itu Nyepi untuk menyatukan beberapa sekte agama yang rawan konflik. Makanya momen Nyepi sangat relevan dengan kondisi saat ini," katanya.

Nyepi di Bali berlangsung selama 24 jam sejak Jumat pukul 06.00 waktu setempat. Selama Nyepi, semua pintu masuk ke Bali, seperti pelabuhan, terminal, dan bandara, ditutup. Semua siaran radio dan televisi dihentikan, tetapi pelayanan umum, seperti rumah sakit, tetap beroperasi. Kamis malam dilaksanakan pawai ogoh-ogoh di sejumlah titik Kota Denpasar.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam, juga dimeriahkan dengan arak-arakan ogoh-ogoh sejak pukul 18.00 dari Pura Pita Maha. Ketua Suka Duka Hindu Dharma Indonesia Kota Palangkaraya Ketut Sudi mengatakan, acara itu tidak digelar selama dua tahun, yakni 2010 dan 2011, karena Kalteng melaksanakan pemilu kepala daerah. (DEN/AYS/BAY)

Pemerintah Alpa, Masyarakat Geram

Bonar : Pemerintah pusat hanya bereaksi pada dua peristiwa kasus HKBP dan Manis Lor

| Sabtu, 25 Januari 2011 |

JAKARTA, KOMPAS.com — Setara Institute menyatakan negara, dalam hal ini pemerintah, gagal menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi 216 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.

"Karena ketidaktegasan pemerintah. Selama ini pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah. Tapi, belum tentu pemda bisa melaksanakannya karena tidak ada kapasitas yang cukup. Bahkan, ada juga elite-elite daerah yang justru menggunakan isu itu untuk mencari dukungan politik dari kelompok pelanggar, bukan untuk menyelesaikan pelanggarannya," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Senin (24/1/2011).

Bonar menambahkan, pemerintah pusat baru akan mengambil alih kasus pelanggaran jika peristiwa tersebut sudah dianggap berbahaya dan mengancam keamanan publik.

Dalam pemerintahan SBY 2010, lanjut Bonar, hanya dua kasus yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Dua kasus tersebut adalah insiden penganiayaan jemaat HKBP, penatua Hasian Lumban Toruan Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak, di Bekasi, 12 September 2010, oleh orang-orang tak dikenal.

Kasus lain, penyerangan masjid jemaah Ahmadiyah Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyerangan itu dilakukan setelah kegiatan istigash yang dihadiri ratusan orang.

Sebelumnya, muncul desakan agar Pemerintah Kabupaten Kuningan menutup tempat-tempat ibadah warga Ahmadiyah di desa tersebut. "Pemerintah pusat hanya bereaksi pada dua peristiwa kasus HKBP dan Manis Lor," katanya.

Sisanya tidak ada penyelesaian yang jelas dari pusat. Sebanyak 40 persen dari 216 kasus pelanggaran 2010 di Indonesia ini sebenarnya kasus yang sudah lama, tapi masih terus terjadi. "Ini kan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada kebebasan beragama," kata Bonar.

Setara Institute juga menyesali pernyataan SBY yang menyebutkan dalam pemerintahannya sejak 2004 tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi. SBY dianggap melakukan kekeliruan mendasar dari pengertian HAM dan menunjukkan kegagalan pemerintah menyikapi pelanggaran kebebasan beragama yang menjadi salah satu poin pelanggaran HAM.

"Presiden SBY keliru dalam pengertian HAM. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama kan juga bagian dari pelanggaran HAM. Selama pemerintahannya, sudah banyak pelanggaran ini terjadi. Itulah mengapa ia (SBY) dikatakan berbohong oleh beberapa pemuka agama. Pemerintah seharusnya lebih bertindak konkret menanggapi konflik-konflik seperti ini," ujar Ketua Setara Institute Hendarli.

Wali Kota Bekasi Diminta Lakukan Dialog

| Senin, 20 September 2010 |

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bekasi diminta melakukan dialog kembali terkait relokasi tempat beribadah HKBP Ciketing, Bekasi Timur. "Wali Kota harus dialog lagi, relokasi harus jelas lokasinya di mana. Masa, Pemda sendiri tidak tahu saat dimintai petunjuk lokasi yang diusulkannya sendiri," kata Kepala Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM Hafid Abbas seusai diskusi dengan MUI, kepolisian, Kemenkopolhukam, Tokoh Gereja Bethel, Kementerian Agama di Jakarta, Senin (20/9/2010).

Menurut dia, Wali Kota Bekasi harus berdialog lebih lanjut lagi dengan jemaat Gereja HKBP, apakah lokasi dari rencana relokasi tersebut tepat. Pada kesempatan yang sama, ia juga menegaskan bahwa pelaku penusukan dan kekerasan terhadap jemaat Gereja HKBP di Bekasi tersebut harus ditindak tegas. "Itu jangka pendek, pelaku kekerasan di Ciketing harus ditindak tegas. Pelaku harus dihukum karena semua agama tidak membolehkan adanya tindak kekerasan," ujar dia.

Menurutnya "Lebih dari satu dekade reformasi berjalan, tampaknya negara belum juga mampu menggerus watak antidemokrasi. Persoalan jaminan kebebasan beragama sejauh ini masih menjadi gugatan terhadap jalannya kewajiban negara. Padahal, bagian terbesar penyikapan publik masih menerima dan menghargai adanya perbedaan" tambahnya Sementara itu, Ketua MUI Amidhan mengatakan, ada tiga hal yang perlu dibahas. Pertama, tentang kebebasan menjalankan ibadah masing-masing agama. Kedua, terkait pendirian tempat ibadah. Ketiga, peristiwa di Bekasi harus diselesaikan secara terpisah dengan poin pertama dan kedua. "Kasus kekerasan tersebut harus diajukan ke pengadilan dan diselesaikan secara transparan," ujar dia.

Terkait dengan pendirian tempat ibadah dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung 90 orang dengan kartu tanda penduduk yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Selain itu, perlu ada dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dan hal ini disahkan oleh lurah atau kepala desa. Harus ada pula rekomendasi tertulis kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beragama (FKUB) kabupaten/kota. Jika persyaratan-persyaratan tersebut belum dapat terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 ayat 3 Surat Keputusan Bersama dua Menteri Agama dan Dalam Negeri, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kurnia Irianti

Tempat & Tgl Lahir : Yogyakarta, 29 Juni 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl. C.Simanjuntak, Terban GK v/605 RT.22 RW.05
Yogyakarta 55223.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Terbansari I, Yogyakarta (1997)
2. SLTP N 2 Pakem, Sleman Yogyakarta (2000)
3. SMK KOPERASI, Yogyakarta (2003)
4. S1 (Komunikasi dan Penyiaran Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)